



DIBIYAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN **Pemkot Dapat Tambahan 40 Kube**

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akhirnya memperoleh kuota pendampingan untuk 50 Kelompok Usaha Bersama (Kube). Lantaran baru tersosialisasikan untuk 10 Kube, maka 40 Kube sisanya akan ditambahkan melalui APBD Perubahan tahun ini. Pendampingan tersebut hanya khusus yang dibiayai melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Bidang garapan PKH dari Kementerian Sosial itu sebenarnya cukup beragam. Penambahan kuota pendampingan Kube ini pun diharapkan mampu mendongkrak penerima manfaat agar mampu produktif atau berwiraswasta. "Harapan kami tidak hanya menerima bantuan uang tunai, tapi bisa berusaha. Kan tujuan utamanya pengentasan kemiskinan, makanya Kube menjadi sasaran juga dalam PKH," urai Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya, Irianto Edi Purnomo, Selasa (26/7).

Oleh karena itu anggota kelompok usaha bersama tersebut diprioritaskan untuk peserta PKH yang sudah memiliki rintisan usaha. Terutama rintisan usaha skala kecil dan sangat membutuhkan tambahan modal. Namun, tidak menutup kemungkinan jika ang-

gota yang tergabung dalam Kube tersebut sama sekali belum memiliki rintisan usaha apapun.

Irianto Edi menambahkan, setiap kelompok beranggotakan sepuluh orang. Usaha yang dijalani oleh setiap kelompok juga berbeda-beda. Namun sebagian besar bergerak di bidang kuliner seperti membuka warung makan, membuka usaha kue dan roti. "Tetapi ada pula yang berencana membuka usaha laundry. Kami akan terus dorong agar bisa mandiri," imbuhnya.

Kendati demikian, besaran dana yang akan diperoleh tiap Kube, imbuhnya belum bisa dipastikan lantaran merupakan dana dari pemerintah pusat. Hanya, bagi setiap anggota PKH selama ini selalu rutin memperoleh bantuan dana setiap tiga bulan sekali. Besaran dananya pun berbeda-beda sesuai kebutuhan keluarga serta bebannya.

Selain Kube, pada tahun ini Pemkot Yogya akan merehabilitasi 70 rumah tidak layak huni. Sudah ada usulan dari tiap kelurahan yang akan segera ditindaklanjuti dengan survei lapangan. Dimungkinkan perbaikan rumah tak layak huni tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan MCK dan lantai rumah.

(Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005